

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Keuangan Daerah

1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Ratmono dan Sholihin (2015) Akuntansi Keuangan Daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Pihak-pihak eksternal entitas pemda tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), investor, kreditur, donator, analisis ekonomi, rakyat, dan Pemerintah Pusat.

2. Peran Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Ratmono dan Sholihin (2015) peran Akuntansi Keuangan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam tahap pelaporan keuangan pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD. Peran penting akuntansi bagi pemda ditunjukkan dalam pasal 51 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yaitu setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Selaku Bendahara Umum Daerah) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku Pengguna Anggaran) harus menyelenggarakan akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berada dalam tanggungjawabnya.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara *efficient, effective, transparency* dan *responsible* serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pengelolaan keuangan biasanya telah tercantum dalam APBD. APBD digunakan sebagai acuan dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan pemasukan serta pengeluaran suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai seluruh kegiatan yang terdiri dari *planning, implementation, administration, reporting, pertanggungjawaban* dan pengawasan keuangan pemda (Siregar, 2015).

C. Belanja

Menurut Siregar (2015) belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah

daerah. Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

a. Belanja Tidak Langsung

Menurut Siregar (2015) belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

Menurut Siregar (2015) belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

D. Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Menurut Siregar (2015) anggaran merupakan pedoman Tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran merupakan dokumen yang penting bagi semua instansi pemerintah maupun swasta. Hal ini karena anggaran digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Anggaran

memuat berbagai komponen mulai dari expense, revenue, dan financing yang dilakukan oleh instansi.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Siregar (2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Struktur utama APBD adalah pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3. Anggaran Belanja

Menurut Mahmudi (2016) secara normative anggaran belanja adalah batas tertinggi pengeluaran daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

E. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Siregar (2015) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah suatu laporan yang terdiri atas iktisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemda selama periode yang telah ditentukan yang

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat berguna untuk pihak-pihak berkepentingan untuk menilai kinerja pemerintah atau dinas. Dalam LRA terdapat informasi mengenai anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam LRA juga mencantumkan realisasi anggaran pada periode tersebut.

Dengan adanya komponen tersebut, maka LRA dapat digunakan untuk menghitung efektivitas maupun efisiensi anggaran. Penghitungan tersebut dapat menggunakan cara dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya ataupun sebaliknya.

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya.

Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 1) selisih disukai (*favourable variance*) dan 2) selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance* Rumus analisis varians belanja:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

F. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mardiasmo (2013) rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi

menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis efisiensi. Berikut adalah rumus efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

G. Analisis Trend

Menurut Prastowo (2012) analisis *trend* merupakan salah satu Teknik analisis laporan keuangan dan termasuk metode analisis horizontal. Analisis ini menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode (dari tahun ke tahun). Pada Teknik analisis ini, data laporan keuangan untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan persentase atas dasar tahun dasar.

Analisis *trend* ini menjadi berguna karena dua alasan, yaitu mengungkapkan perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu, dan memberikan informasi tentang arah ke mana perusahaan akan bergerak. Rumus analisis trend sebagai berikut:

$$\text{Analisis Trend} = \frac{\text{Data Tahun Tertentu}}{\text{Data Tahun Dasar}}$$